

## PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* DAU, PAD, SILPA TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA DI JAWA TIMUR

Annora Prakoso Mianto  
annorapmi@gmail.com  
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine empirically whether there was effect of Flypaper Effect on General Allocation Fund (DAU), Regional Original Income (PAD), and Remaining More Budget Financing (SILPA), on Regency / City Regional Expenditures in East Java Province, 2014-2017. the population was 38 regency / municipal government in East Java Province 2014-2017 with total population of 152 local government. While, the data collection technique used saturated sampling, in which all populations were used as simple. Moreover, the data were in the form of Budget Realization Report data from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of East Java provinsi. In addition the data analysis technique used on multiple regression analysis. The reset Sri should be concluded Local Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) had positive effect on Regional Expenditure. On the other hand, the Remaining More Budget Financing (SILPA) haf negatif effect on Regional Expenditure. Meanwhile, Flypaper Effect did not affect Regional Expenditure.*

*Keywords: flypaper effect, general allocation funds, regional original revenue, remaining over budget financing, and regional expenditures.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terjadi pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014-2017 sehingga total seluruh populasi adalah 152 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel. Data dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah dan *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: *flypaper effect*, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan belanja daerah.

### PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang memenuhi aspek demokratis dan desentralisasi yang sesungguhnya. Daerah otonom mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakat setempat dan pemerintah sesuai dengan perundang-undangan (Halim, 2007). Tujuan otonomi daerah sendiri adalah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Terwujudnya keadilan nasional seperti halnya semua kebijakan yang dirumuskan dan dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam hal keuangan, pemanfaatan sumber daya alam, dan pelayanan umum harus memperhatikan keadilan dan keselarasan di dalam ruang lingkup masyarakat itu sendiri, pengembangan kehidupan berdemokrasi yang dilakukan dengan cara seperti pemilihan kepala daerah, dan penampungan aspirasi masyarakat di dewan legeslatif seperti DPRD. Mendorong pemberdayaan masyarakat dengan cara pembentukan usaha-usaha kecil

di daerah seperti Unit Mikro Kecil Menengah agar masyarakat daerah juga semakin mandiri tidak menggantungkan pemerintah. Semua itu dijelaskan lebih dalam bagaimana implementasi hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Kebijakan baru ini sebagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber dayanya dengan efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah daerah juga memiliki PAD. Semua dana tersebut digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan fiskal antar daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang diberikan kepada daerah atas dasar kebijakan yang bersifat darurat. Terdapat tiga pemikiran mengenai DAU yaitu: DAU adalah hibah dari pemerintah pusat ke daerah, DAU tidak harus dipertanggungjawabkan karena konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah, dan DAU harus dipertanggungjawabkan karena DAU berasal dari APBN baik ke masyarakat atau ke pusat (Saragih dan Khadafi, 2003). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain.. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang atau bagian tertentu yang bisa dilaksanakan bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah yang sah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi (Kusumadewi dan Rahman, 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selanjutnya terdapat Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Pendapatan asli daerah sebagai tulang punggung pembiayaan daerah oleh sebab itu kemampuan pelaksanaan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD kepada APBD artinya semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat (Mardiasmo 2002). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan sumber penerimaan internal dari pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah ditahun berjalan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terbentuk karena terdapat beberapa faktor salah satunya adalah pelampauan pendapatan daerah yang tidak dihitung dalam anggaran. Jumlah dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun memang disengaja oleh pemerintah yang bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah agar melakukan investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tahun anggaran periode berikutnya. Belanja daerah adalah kewajiban dari pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintah yang sudah menjadi kewajiban bagi provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang atau

bagian tertentu yang bisa dilaksanakan bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung untuk kegiatan dan pelaksanaan program sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung untuk kegiatan dan pelaksanaan program. Menurut Iskandar (2012) *Flypaper Effect* adalah keadaan dimana stimulus dari pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah transfer dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Kusumadewi dan Rahman (2007) telah menguji apakah terdapat *Flypaper Effect* di kabupaten atau kota di Indonesia dan hasil dari penelitiannya diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum pada masing-masing daerah memiliki pengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maimunah (2006), Kusumadewi dan Rahman (2007), Junaidi (2012), tentang *Flypaper Effect* yang berpengaruh signifikan, Adiputra (2014) tentang *Flypaper Effect* yang tidak berpengaruh signifikan, dan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) yang memberikan hasil bahwa PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah penambahan variabel bebas yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan variabel terikat yang semula belanja modal dirubah dengan belanja daerah. Dari penjelasan secara umum diatas maka peneliti akan meneliti sejauh mana pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah; (2) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah; (3) Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Daerah; (4) Apakah *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah; (2) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah; (3) pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah; (4) pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Mahmudi (2005), Dalam teori keagenan (*Agency Theory*) menghubungkan antara prinsipal dan agen yang tercermin di dalam kontrak antar individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain. Beberapa aturan yang merupakan manifestasi dari teori keagenan yaitu (1) Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, mengatur hubungan antara legeslatif dan eksekutif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legeslatif UU No. 22 Tahun 1999 atau di usulkan untuk diberhentikan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan bentuk implementasi dari teori agensi di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legeslatif setiap tahun atas anggaran yang telah dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepada daerah berakhir; (2) Dalam UU No. 32 Tahun 2004, mengatakan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat (sebagai *principal*) akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak kepada pemerintah daerah (sebagai *agent*). Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian dalam mengurus daerahnya, dengan kemandirian dalam mengelola sumber daya keuangan maupun non keuangan menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejahterakan rakyat. Khusaini dan Yustika (2006)

menjelaskan dengan kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

### **Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan merumuskan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut sekarang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu menjalankan hak, kewajiban, dan wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan masyarakat sekitar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realitas hubungan fiskal antara masing-masing daerah ditandai dengan banyaknya campur tangan dari pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap nilai total pendapatan daerah dibandingkan dengan dana alokasi yang dikirim oleh pemerintah pusat.

Menurut Kuncoro (2004) menyatakan setidaknya ada lima yang dapat menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat adalah kurang berperan sertanya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, bersifat politis dan kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

### **Otonomi Daerah**

Menurut Kuncoro (2004) otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah yang bertujuan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan dari masyarakat daerah tersebut dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dampak dari kebijakan diatas berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah dari *command and control* menjadi orientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai *stimulator*, *entrepreneur*, dan *coordinator* dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD dijelaskan secara rinci tentang program apa saja yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bagaimana membiayai program tersebut. Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 proses Penyusunan APBD mempunyai beberapa tujuan, pertama menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang publik. Kedua, Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah kepada masyarakat dan DPR/DPRD. Ketiga membantu pemerintah dalam koordinasi antar bagian di lingkungan pemerintah dan pencapaian tujuan fiskal.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi pendapatan asli daerah masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002). Dari pengertian yang diambil melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan pajak maupun non pajak berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi daerah dan harus terus dikembangkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat dijadikan sebagai barometer untuk suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya otonomi, tingkat kemandirian dari suatu daerah dapat meningkat yang dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah atau pungutan lainnya seperti retribusi dan pendapatan lain yang sah.

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun sebelumnya yaitu penerimaan dari pembiayaan yang digunakan untuk menutupi anggaran yang defisit jika lebih besar nilai dari realisasi belanja daripada realisasi pendapatan dan mendanai kewajiban yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 37, menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Negara (SILPA) tahun sebelumnya adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan dalam menutupi defisit anggaran jika realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja.

### ***Flypaper Effect***

*Flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant *et al* (1979), sampai saat ini belum ada penyepadanan kata *flypaper effect* dalam bahasa Indonesia, oleh sebab itu kata *flypaper effect* dituliskan sebagaimana tanpa diterjemahkan. *Flypaper effect* adalah kondisi dimana keuangan pemerintah daerah dalam berbelanja lebih banyak menggunakan dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kusumadewi dan Rahman, 2007). Fenomena *flypaper effect* terjadi ketika pemerintah daerah belanja daerahnya lebih banyak menggunakan dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya, sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanjanya. Menurut (Maimunah, 2006) *flypaper effect* adalah kondisi dimana pemerintah daerah menggunakan dana transfer lebih besar daripada dengan menggunakan kemampuan dari daerah itu sendiri untuk melakukan belanja.

### **Belanja Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui dapat mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Menurut Halim (2007), belanja daerah adalah semua pengeluaran APBD dalam satu periode yang terdiri dari tiga unsur yaitu penerimaan, belanja pembangunan, dan belanja rutin. Widanta (2008) membagi pengeluaran pemerintah menjadi lima jenis, pertama pengeluaran

yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang bersangkutan, misalnya pengeluaran untuk perusahaan, kedua adalah pengeluaran yang reproduktif yang berarti mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah, misalnya penerimaan untuk pendidikan dan kesehatan, ketiga pengeluaran yang tidak *self liquidating* yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahana meskipun saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan akan naik, dan yang terakhir pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan sayang, semisal pengeluaran untuk anak yatim piatu, jika hal ini tidak dijalankan sekarang kebutuhan pemeliharaan tersebut akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan (Saragih dan Khadafi, 2003). Tetapi penerimaan daerah dari unsur Pendapatan Asli Daerah saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Dalam beberapa tahun berjalan proporsi Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah relatif tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah termasuk di dalamnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Harianto dan Adi (2007). Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah masih bergantung dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006), Kusumadewi dan Rahman (2007), Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis pertama adalah:

H<sub>1</sub>: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, artinya disetiap penyusunan APBD jika pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Daerah maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang juga mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Besar atau kecilnya Belanja Daerah akan ditentukan berdasarkan seberapa besar Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan Belanja Daerah maka pemerintah daerah harus menggali lebih dalam Pendapatan Asli daerah untuk kebutuhan dan tujuan dapat terealisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi dan Rahman (2007), Adiputra (2014), Prakosa (2004) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis kedua adalah:

H<sub>2</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

#### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode. SILPA di tahun sebelumnya yaitu penerimaan dari pembiayaan yang digunakan untuk menutupi anggaran yang defisit jika lebih besar nilai dari realisasi belanja daripada realisasi pendapatan dan mendanai kewajiban yang belum terselesaikan hingga akhir tahun

anggaran. SILPA yang merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran jika realisasi pendapatan lebih sedikit dibanding realisasi belanja, mendanai kewajiban lain yang sampai akhir tahun belum selesai, mendanai pelaksanaan belanja langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2016), Martinus (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga adalah:

H<sub>3</sub>: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

### **Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah**

*Flypaper Effect* terjadi karena adanya kepentingan pemerintah daerah untuk mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat dengan cara meningkatkan anggaran belanja, dengan meningkatnya anggaran belanja pemerintah pusat akan mengupayakan dana transfer yang lebih besar daripada mengoptimalkan kemampuan sumber daya dari pemerintah daerah itu sendiri. Penelitian dari (Maimunah, 2006) mengisyaratkan bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006), Junaidi (2012), Kusumadewi dan Rahman (2007) menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis keempat adalah:

H<sub>4</sub>: *Flypaper Effect* berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2008). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah. Populasi penelitian ini adalah kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota provinsi Jawa Timur di tahun 2014-2017.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh atau sensus adalah adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008). Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Dalam penelitian ini karena jumlah populasi terbatas sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus yaitu data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun periode 2014-2017.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter yaitu data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun periode 2014-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung melalui perantara, data dalam penelitian ini bersumber dari situs departemen keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ([www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)). Selain itu data juga dapat diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupa laporan realisasi anggaran.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang diduga dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan *Flypaper Effect*.

### Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan maksud dan tujuan pemerataan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah akan mendapatkan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah yang relatif tinggi, sedangkan daerah dengan kemampuan fiskal yang tinggi akan mendapatkan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif rendah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer pemerintah pusat untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Alokasi Dasar = Proyeksi Belanja Gaji PNS Daerah Dalam Setahun Kedepan

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal = Total Belanja Daerah Rata-Rata x (Presentase Jumlah Penduduk + Presentase Luas Wilayah + Presentase Invers Indeks Pembangunan Manusia + Presentase Indeks Kemahalan Konstruksi + Presentase Pendapatan Domestik Regional Bruto)

Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan dengan menggunakan *fiscal gap*, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan oleh kebutuhan daerah sesuai dengan potensi daerah masing masing.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang diperoleh daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan satuan rupiah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari total PAD yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut Abdullah dan Halim (2004) SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang terdapat dalam APBD tahun anggaran berjalan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dapat dihitung dengan cara surplus/defisit dikurangi dengan pembiayaan netto. Jika nilai dari SILPA positif maka masih ada dana yang tersisa, sebaliknya jika SILPA negatif maka pembiayaan neto belum cukup untuk menutup defisit anggaran.

SILPA = Surplus/defisit - Pembiayaan Netto



### ***Flypaper Effect***

*Flypaper effect* adalah suatu keadaan dimana pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana transfer yang diproksikan sebaagai Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak daripada menggunakan sumber dana dari kemampuan pemerintah daerahnya sendiri yang diproksikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika Dana Alokasi Umum lebih signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah maka situasi ini disebut *Flypaper Effect*. Jika difungsikan maka  $b_1 > b_2$  berarti  $\frac{b_1}{b_2} > 1$  maka terjadi *flypaper effect* dan sebaliknya (Maimunah, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, dengan memodifikasi sistem penilaian dengan memberikan nilai 1 apabila terjadi *Flypaper Effect* dan 0 apabila tidak terjadi *Flypaper Effect*.

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Yang dimaksud dengan belanja modal adalah angka realisasi belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2014 hingga tahun 2016. Untuk menghitung rasio Belanja Modal diukur dengan rumus: Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah diperoleh menjadi sebuah informasi dan kemudian disajikan dalam bentuk diagram, tabel, dan gambar (Ghozali, 2016). Dalam pengujian statistik deskriptif ini juga bertujuan membandingkan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Flypaper Effect*, Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) dengan Belanja Daerah.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan suatu pengujian atas data yang diperoleh untuk memenuhi asumsi dasar. Pada model regresi linier berganda terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, untuk itu perlu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi model klasik terlebih dahulu sebelum beranjak ke model regresi linier berganda. Adapun asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

#### **Uji Normalitas**

Konsep uji normalitas yaitu menguji nilai-nilai residual yang telah terstandarisasi, apakah nilai residual tersebut terdistribusi dengan normal. Pengujian normalitas melalui analisis grafik dengan cara analisis grafik *Normal Probability (P-Plot of Regression Standardized Residual)*. Data yang dihasilkan akan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pengujian secara statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov*. Jika hasil signifikansi uji *Kolmogrov-Smirnov* dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal, jika data yang diuji menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka residual distribusi tidak normal (Ghozali, 2016).

#### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan

oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $<0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2016).

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linear berganda apakah terdapat korelasi antara serangkaian data observasi yang diuraikan secara *time-series* dan jika terjadi korelasi maka biasa disebut problem autokorelasi. Ukuran dalam menemukan problem korelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan syarat apabila (1) nilai DW dibawah -2 ( $DW < -2$ ) maka korelasi positif; (2) nilai DW berada diantara -2 dan 2 ( $-2 \leq DW \leq 2$ ) maka autokorelasi; (3) nilai DW diatas 2 ( $DW > 2$ ) maka autokorelasi positif

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

### Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Flypaper Effect*, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah. Hubungan dari variabel bisa digambarkan dengan persamaan sebagai berikut.

$$BD = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 PAD + \beta_3 FEF + \beta_4 SILPA + e$$

Keterangan :

BD : Belanja Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi

DAU : Dana Alokasi Umum

PAD : Pendapatan Asli Daerah

FEF : *Flypaper Effect*

SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

$e$  : *Error*

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau uji anova menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat  $\alpha$  sebesar 5% (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi (Ghozali, 2016), yaitu sebagai berikut (1) Jika nilai signifikan uji F  $> 0,05$  maka, model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya; (2) Jika nilai signifikan uji F  $< 0,05$  maka, model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi dalam koefisien determinasi yang digunakan sebesar 5% (Ghozali, 2016). Persentase tersebut dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Semakin besar hasil koefisien determinasinya maka semakin baik variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen menerangkan variabel dependen dengan menanggapi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Pengambilan keputusan dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi (Ghozali, 2016) adalah sebagai berikut kriterianya (1) Jika angka probabilitas signifikansi uji t > 0,05 maka, hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Berarti secara uji statistik t, variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika angka probabilitas signifikansi uji t < 0,05 maka, hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan banyaknya data yang digunakan yaitu nilai maximum dan minimum, rata-rata standar deviasi. Dari pengumpulan data sekunder tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), *Flypaper Effect*, dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sampai tahun 2017. Berikut ini adalah hasil dari perhitungan yang didapatkan melalui SPSS tentang statistik deskriptif.

Tabel 1  
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	152	380,779.79	1,709,892.85	943,390.3261	282,402.29097
PAD	152	80,493.92	5,145,149.90	401,779.7363	667,784.57849
SILPA	152	-111,793.34	1,414,929.81	254,522.5297	235,593.67102
FEF	152	0	1	.95	.210
BD	152	610,051.03	7,881,587.71	1,996,973.3665	1,045,076.52043
Valid N (listwise)	152				

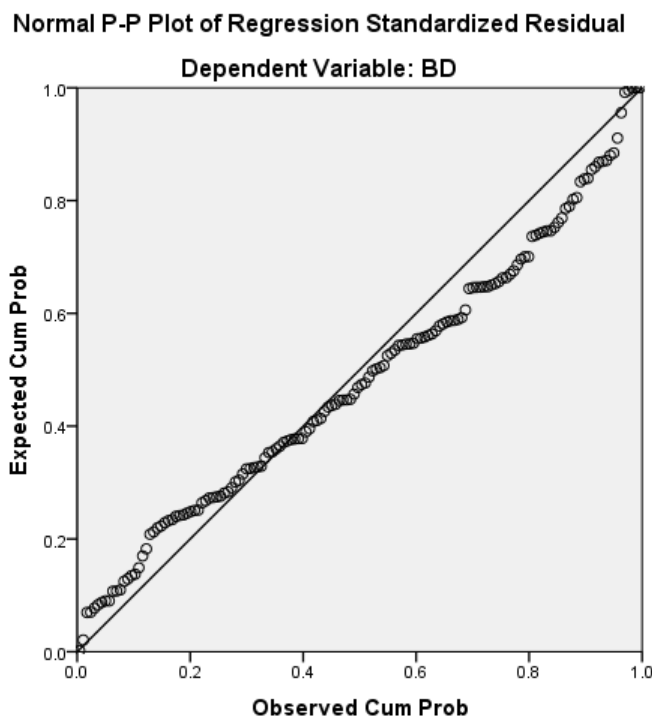
Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 bahwa (1) Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 943,390.3261, sedangkan nilai standart deviasi dalam variabel ini sebesar 282,402.29097, dari nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diambil sebagai sampel baik karena distribusi data cenderung normal. Nilai minimum dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 380,779.79 dan nilai maksimum sebesar 1,709,892.85; (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 401,779.7363, sedangkan nilai standart deviasi dalam variabel ini sebesar 667,784.57849, dari nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil sebagai sampel kurang baik karena standar deviasi merupakan pencerminan terjadinya penyimpangan. Nilai minimum dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80,493.92 dan nilai maksimum sebesar 5,145,149.90; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mempunyai nilai *mean* (rata-rata)

sebesar 254,522.5297, sedangkan nilai standart deviasi dalam variabel ini sebesar 235,593.67102, dari nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diambil sebagai sampel baik karena distribusi data cenderung normal. Nilai minimum dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar -111,793.34 dan nilai maksimum sebesar 1,414,930.81; (4) *Flypaper Effect* mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 0.95 sedangkan nilai standart deviasi dalam variabel ini sebesar 0 dari nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* yang diambil sebagai sampel baik karena distribusi data cenderung normal. Nilai minimum dari *Flypaper Effect* sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00; (5) Belanja Daerah mempunyai nilai *mean* (rata-rata) sebesar 1,996,973.3665 sedangkan nilai standart deviasi dalam variabel ini sebesar 1,045,076.52043 dari nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa Belanja Daerah yang diambil sebagai sampel baik karena distribusi data cenderung normal. Nilai minimum dari Belanja Daerah sebesar 610,051.03 dan nilai maksimum sebesar 7,881,588.71.

### Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data yang normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini melihat apakah suatu model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak, itu dengan analisis grafik normal *P-P Plot Regression Standardized residual*. Hasil uji normalitas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

**Gambar 1**  
Normal P-P Plot Regression Standardized

Berdasarkan pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas tidak hanya di lihat dari *Normal Probability Plot* saja namun dapat dilihat dari perhitungan statistik dengan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), maka telah diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	241233.94372949
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.230
Asymp. Sig. (2-tailed)		.097

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas residual dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,097, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak suatu korelasi yang signifikan diantara variabel independen satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas yang di analisis dengan menggunakan nilai *Tolerance value* dan VIF (*Variance Infation Factor*). Suatu model dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai *tolerance value* diatas 0,10 dan VIF (*Value Inflation Factor*) dibawah 10. Berikut hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada perhitungan statistik sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
DAU	.872	1.146	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PAD	.226	4.418	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SILPA	.381	2.625	Tidak Terjadi Multikolinieritas
FEF	.259	3.863	Tidak Terjadi Multikolinieritas

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui dari semua variabel dengan melihat hasil perhitungan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan hasil perhitungan VIF < 10, maka telah disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel dependen dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto (2013) uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut (*time-series*) atau ruang (*cross section*). Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4  
Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 <sup>a</sup>	.947	.945	244494.00973	1.532

a. Predictors: (Constant), FEF, DAU, SILPA, PAD

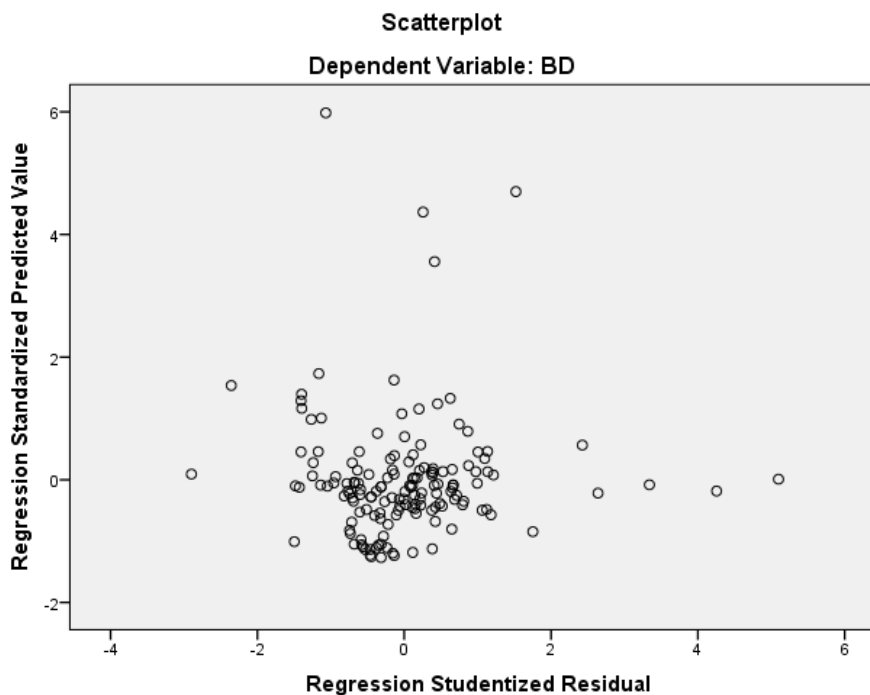
b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada Tabel 5, menunjukkan angka *Durbin Watson* sebesar 1.532. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama maka terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda terjadi Heterokedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dijelaskan melalui perhitungan statistik yang tertera pada tabel dibawah ini:



Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Gambar 2  
Regression Standardized Predicted Value

Berdasarkan hasil pengujian statistik gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini juga menunjukkan hasil estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk interpretasi dan analisis lebih lanjut.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda

Tabel 5  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1.934	2.051		-.943	.347
DAU	1.681	.075		22.290	.000
PAD	1.308	.063		20.880	.000
SILPA	-.408	.137		-2.985	.003
FEF	1.915	1.859		1.030	.305

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Lporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$BD = -1.934 + 1.681 DAU + 1.308 PAD + 1.915 FEF - 0,408 SILPA + e$$

Berdasarkan pada hasil persamaan regresi linier berganda pada tabel dapat diintrepetasikan sebagai berikut (1) Konstanta ( $\alpha$ ) Pada persamaan dari regresi linier berganda mempunyai nilai konstanta sebesar -1.934 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan *Flypaper Effect* bernilai 0, maka variabel dependen yakni Belanja Daerah sebesar -1.934; (2) Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 1.681. Nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang melambangkan hubungan searah antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Daerah; (3) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 1.308, Nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang melambangkan hubungan searah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah; (4) Nilai koefisien regresi variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar -0,408. Nilai koefisien regresi ini bersifat negatif yang melambangkan hubungan yang berlawanan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Belanja Daerah; (5) Nilai koefisien regresi variabel *Flypaper Effect* adalah sebesar 1.915, Nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang melambangkan hubungan yang searah antara *Flypaper Effect* dengan Belanja Daerah.

### Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut dapat dilihat hasil uji kelayakan model (Uji F) pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 6  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.56133E+14	4	3.90332E+13	652.976	.000 <sup>b</sup>
Residual	8.78727E+12	147	59777320794		
Total	1.6492E+14	151			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), FEF, DAU, SILPA, PAD

Sumber : Data Laporan Keuangan diolah, 2019

Berdasarkan nilai statistik pada tabel dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 652.976 dengan tingkat signifikan 0,000. Maka nilai uji F tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan *Flypaper Effect* memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah, sehingga dalam hal ini model layak memenuhi *goodness of fit*.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 7  
Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.973 <sup>a</sup>	.947	.945	244494.00973

a. Predictors: (Constant), FEF, DAU, SILPA, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi *R-Squares* sebesar 0,947 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), *Flypaper Effect*, serta Belanja Daerah sebagai variabel terikat sebesar 94,7% dan sisanya 5,3% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

### Uji t

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0,05. Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak, ini menandakan bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut dapat dilihat hasil Uji t pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 8  
Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-1.934	2.051	-.943	.347
	DAU	1.681	.075	22.290	.000
	PAD	1.308	.063	20.880	.000
	SILPA	-.408	.137	-2.985	.003
	FEF	1.915	1.859	1.030	.305

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Laporan Keuangan BPKAD diolah, 2019

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa hasil uji t dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: (1) Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 22.290 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ( $H_1$ ) dalam penelitian ini diterima dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah; (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 20.880 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti



kurang dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ( $H_2$ ) dalam penelitian ini diterima dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) anggaran menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar -2.985 dan memiliki nilai signifikansi 0,003 yang berarti kurang dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ( $H_3$ ) dalam penelitian ini diterima dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah; (4) *Flypaper Effect* menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 1.030 dan memiliki nilai signifikansi 0,305 yang berarti lebih dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ( $H_4$ ) dalam penelitian ini ditolak dengan demikian *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat dapat semakin mendorong pengeluaran Belanja Daerah yang besar juga. Sehingga dengan semakin besarnya Belanja Daerah maka semakin besar pula Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2004) dan Prakosa (2004) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan positif dengan Belanja Daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Hasil dari penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dalam penelitian ini juga mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemampuan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam menganggarkan Belanja Daerah, sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan maka semakin tinggi juga Belanja Daerah yang di anggarkan.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah**

Hasil dari penelitian menemukan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah dengan nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$ . Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) daerah yang besar merupakan indikasi masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan keuangannya. Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar belum tentu bahwa pemerintah daerah baik dalam pengelolaan anggaran karena masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang relatif tinggi namun capaian pembangunan masih berada dibawah capaian nasional. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) maka belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan semakin rendah karena terdapat anggaran yang belum terealisasi.

### **Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah**

Hasil dari penelitian menemukan bahwa *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan nilai signifikansi sebesar  $0,302 < 0,05$ . Penyebab tidak signifikansi dikarenakan realisasi anggaran belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur masih tergolong rendah hal ini dapat dilihat dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang relatif tinggi. Karena penghematan pemerintah daerah dalam belanja daerah ini menyebabkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal sehingga fenomena *Flypaper Effect* masih belum dapat tercerminkan dalam penelitian ini. *Flypaper Effect* diibaratkan sebagai perpindahan dana dari pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat tanpa adanya pengaruh dan tujuan yang seharusnya tercapai dari dana tersebut, dalam hal ini seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat dapat memperbaiki perekonomian daerah melalui belanja daerah yang kemudian dapat menciptakan potensi fiskal dari perekonomian tersebut seperti pajak dan retribusi. Menurut Kuncoro (2004) *Flypaper Effect* dapat dijelaskan dengan model birokrat. Pertama, masyarakat tidak bisa mempengaruhi tingkat bagi hasil pajak dan bukan pajak serta tarif pajak dan retribusi daerah. Kedua, birokrat memiliki keleluasaan dalam membelanjakan Dana Alokasi Umum, pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil penelitian terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa (1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2017. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga Belanja Daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) sepenuhnya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, Dana Alokasi Umum (DAU) juga dibutuhkan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik; (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014-2017. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan semakin tinggi juga Belanja Daerah. Karena Pendapatan Asli adalah sumber pendapatan utama daerah pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2014-2017. Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) daerah yang besar merupakan indikasi masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan keuangannya. Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang sangat besar menunjukkan masih kurang tepatnya perencanaan anggaran atau masih belum optimalnya penyerapan anggaran; (4) *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017. Hasil penelitian dapat dijelaskan dengan besarnya signifikansi yang diperoleh dari variabel *Flypaper Effect* sebesar  $0,305 > 0,05$ . Hal ini dikarenakan apabila terjadi *Flypaper Effect* maka pencapaian pemberian dana transfer kurang tepat yang mengakibatkan ketidmaksimalan dalam pemanfaatan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); (5) Seluruh variabel independen dalam model simultan memiliki kemampuan prediksi dengan *R-Squared* 0,947 atau 94,7% dapat memprediksi Belanja daerah. Sedangkan sisanya 5,9% dipengaruhi variabel lain diluar model.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam hal melakukan penelitian sebagai berikut (1) Sampel dari penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sehingga hasil penelitian ini tidak dapat secara umum mewakili daerah selain Jawa Timur; (2) Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran sehingga penelitian ini belum terdapat gambaran perilaku aparatur dalam pengalokasian sumber daya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yakni (1) Penelitian selanjutnya diharapkan tidak terbatas pada provinsi Jawa Timur sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum, dan menggunakan data yang lebih dari lima tahun sehingga lebu mampu untuk di generalisasi dan mungkin akan lebih baik hasilnya; (2) Penelitian berikutnya diharapkan untuk

menggunakan pendekatan lain yang lebih mendalam dengan kuisioner dan wawancara dengan subjek eksekutif dan legislatif daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan A, Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* 2(25): 16-17.
- Adiputra, I. M. P. 2014. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 3(2): 140.
- Courant, P.N; E.M. Gramlich, dan D.L. Rubinfeld. 1979. The Stimulative Effect of Intergovernmental Grants: Or Why Money Sticks Where It Hits. The Urban Institute: 5-21.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia. <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id>. 24 Februari 2017 (15:09).
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar* 2(1): 53-64.
- Iskandar, I. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Publikasi Ilmiah UMS* 13(1): 113-131.
- Junaidi. 2012. Asimetri pada Flypaper Effect: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14(1): 45-55.
- Khusaini, M., & Yustika, A. E. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi, dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Kusnandar. dan D. Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposim Nasional Akuntansi XV* 1(2): 1-20.
- Kusumadewi, D. A. dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8(2): 54-57.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Ilmiah Padang*. Simposium Nasional akuntansi IX 11(1): 23-26.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Martinus, Darwins, dan S. Abdullah. 2014. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah Riset Akuntansi* 7(1): 52-57.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*.  
 \_\_\_\_\_ Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan*.

- Prakosa, B. P. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8(2): 17-32.
- Saragih dan Khadafi. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Gahalia Indonesia. Jakarta.
- Solikin, A. 2016. Analisis Flypaper Effect Pada Penguian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 16(1): 11-25.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
- Nomor 25 Tahun 1999 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848.
- Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Nomor 33 Tahun 2004 *Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Jakarta.
- Widanta, A. 2008. Peranan Pembiayaan Pembangunan dan Investasi dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Sosial* 1(2): 18-27.